

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 309 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kebutuhan masyarakat dan kesusilaan maka diperlukan Tim yang memiliki kompetensi dalam menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi, selanjutnya dalam Pasal 32 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;

- c. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
 - 6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan

Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu

menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati

Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak .

pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YUSRA ALMABSYI

	PENGELOLA	PARAF
NO	PENGELOLA	N
1.	KABAG HUKUM	1
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	1
3.	SEKRETARIS DAERAH	1 1
4.	WAKIL BUPATI	1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

: 309 TAHUN 2025

TANGGAL

TENTANG

23 Juni

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ИО	KEDUDUKAN	JABATAN		
I.	PENGARAH	: 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW		
		2. WAKIL BUPATI		
II.	KETUA	: SEKRETARIS DAERAH		
III.	SEKRETARIS	: KEPALA BAGIAN HUKUM		
IV.	ANGGOTA	: 1. INSPEKTUR DAERAH		
		2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	1 2	3. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH		
	1 -	4. KEPALA BAGIAN ORGANISASI		
	1 (*)	5. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		
		PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW		
	- 10 mg			
	N			

NO	PENGELOLA	PARAF	
1.	KABAG HUKUM	P	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	0 0	
3.	SEKRETARIS DAERAH	1	
4.	WAKIL BUPATI	h	

Agupati Bolaang mongondow,